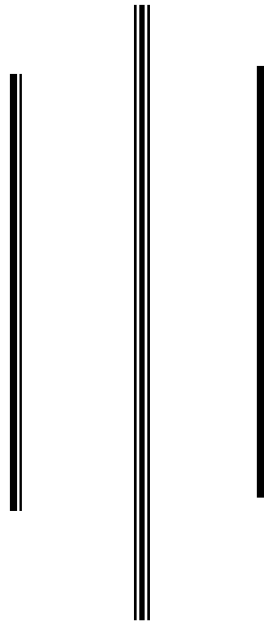




RENCANA KERJA TAHUN 2023



**DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA
TARUTUNG**

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat Rahmat dan KaruniaNya penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Rencana Kerja Tahun 2023 ini disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019–2024 dan juga Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 yang bertujuan untuk memberikan arahan dan acuan dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara yang menyesuaikan dinamika perubahan yang terjadi di tahun 2023 khususnya terjadinya pandemi covid-19 yang melanda dunia.

Atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang terkait dalam penyiapan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 ini kami ucapkan terima kasih dan semoga Tuhan menolong kita. Amin.

TARUTUNG, 22 DESEMBER 2022

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**

**Drs. SOFIAN SIMANJUNTAK
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640201 199303 1 00**

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penyusunan	4
 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	20
2.4. Review terhadap RKPD	25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
 BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	35
3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	40
 BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	43
 BAB V. PENUTUP	
5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan	49
5.2. Rencana Tindak Lanjut	50

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Realisasi Anggaran APBD Tahun Anggaran 2021	5
Tabel 2.2	Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 .	8
Tabel 2.3	Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 s/d Triwulan II	13
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara	19
Tabel 2.5	Review Terhadap RKPD Tahun 2023	26
Tabel 2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	30
Tabel 3.1	Identifikasi Kebijakan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten	34
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, dan Target Renstra Tahun 2020-2024 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara	36
Tabel 3.3	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Renja Tahun 2023	41
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Renja Tahun 2023	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan Rencana Kerja merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Sejak tahun 2020 hingga saat ini, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid-19). Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia yang menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian perencanaan pembangunan sektor ketenagakerjaan pada tahun 2023 tetap difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, yaitu dengan peningkatan pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi bagi tenaga kerja agar lebih memiliki skill/keterampilan/keahlian dalam bidang tertentu dengan harapan mereka akan dapat mandiri dan berwirausaha sehingga akan dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Tapanuli Utara.

Sebagai implementasi penguatan perencanaan pembangunan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, penyusunan Rencana Kerja tahun 2022 dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program) dan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

Rencana Kerja tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025.;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021;
20. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai acuan/pedoman penganggaran tahunan sektor ketenagakerjaan pada tahun 2023. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 adalah :

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan pada sektor ketenagakerjaan;
2. Menjadi acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan tahun 2023 pada sektor ketenagakerjaan;
3. Manjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;

4. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan;
5. Sebagai instrumen untuk memudahkan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

1.4. Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Bab ini memuat informasi tentang evaluasi renja tahun lalu dan capaian renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review atas RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini memuat informasi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja SKPD, serta program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab ini memuat informasi tentang rencana kerja dan pendanaan yang akan dicapai.

Bab V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Capaian Kinerja dan Keuangan Renja Tahun 2021 berisi target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen Rencana Kerja tahun 2021 yang sudah ditetapkan. Target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD dan Renstra Tahun 2021, sedangkan jumlah anggaran untuk setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan P-APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2021. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja digunakan untuk melihat capaian tingkat kemajuan dan kesesuaian dengan Renstra.

Untuk tahun 2021, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan 4 program, 9 kegiatan, dan 21 sub kegiatan. Realisasi penyerapan anggaran adalah sebesar Rp. 3.463.461.832,00 atau 93,76% dari total APBD sebesar Rp. 3.694.028.450,00. Realisasi anggaran belanja belanja langsung berdasarkan Perangkat Daerah ditampilkan pada tabel berikut :

TABEL 2.1
REALISASI ANGGARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja		3.694.028.450,00	3.463.461.832,00	93,76
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.091.037.300,00	2.871.028.722,00	92,88
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	5.425.500,00	90,43
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	1.627.500,00	81,38
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00	3.798.000,00	94,95
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.662.491.200,00	2.463.342.145,00	92,52
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.618.340.000,00	2.419.563.445,00	92,41
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.151.200,00	42.151.200,00	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	1.627.500,00	81,38
C	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	177.573.800,00	173.180.500,00	97,53
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.950.500,00	99,01

7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.998.600,00	30.207.000,00	97,45
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.221.000,00	6.096.500,00	98,00
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.267.200,00	9.492.500,00	77,38
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	7.012.000,00	6.780.000,00	96,69
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.075.000,00	115.654.000,00	99,64
D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.998.500,00	152.500.467,00	92,99
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.991.000,00	99,55
13	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	29.998.500,00	18.509.467,00	61,70
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.000.000,00	132.000.000,00	100,00
E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.973.800,00	76.580.110,00	94,57
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.313.800,00	18.328.610,00	82,14
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.000.000,00	48.621.500,00	99,23
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.660.000,00	9.630.000,00	99,69
II	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	40.000.000,00	38.600.500,00	96,50
F	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	38.600.500,00	96,50
18	Pelayanan Antar Kerja	40.000.000,00	38.600.500,00	96,50
III	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	506.153.350,00	499.940.610,00	98,77
G	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	506.153.350,00	499.940.610,00	98,77
19	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	506.153.350,00	499.940.610,00	98,77
IV	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	56.837.800,00	53.892.000,00	94,82
H	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.999.800,00	14.815.000,00	98,77
20	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	14.999.800,00	14.815.000,00	98,77

I	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	41.838.000,00	39.077.000,00	93,40
21	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	41.838.000,00	39.077.000,00	93,40

TABEL 2.2
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021 per Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021				
							I				II				III							IV			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				1	2	3	4
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja																									
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan		Nilai Hasil Evaluasi AKIP (Nilai)	85,00	16.501.895.399	61,13	472.697.300	65,00	3.091.037.300		401.155.355		1.098.072.064		1.053.271.098		910.963.315		3.463.461.832		5.220.301.452	0,00	20,26		
			Persentase Teman BPK dan Inspektoral yang Ditindaklanjuti (%)	100,00		100,00																0,00			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		CAKUPAN PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI (%)	100	16.501.895.399	100	472.697.300	100	3.091.037.300	13,50	401.155.355	26,97	802.592.536	35,23	903.386.288	24,30	763.894.543	100,00	2.871.028.722	100,00	10.446.000	100,00	20,26		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tertelaksananya Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Bulan)	60	42.000.000	24	5.020.500	12	6.000.000		-	6	3.627.500	3	1.000.000	3	798.000	12	5.425.500	36	10.446.000	60,00	24,87		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisat Realisasi Kinerja SKPD		Tertelaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ihtisat Realisasi Kinerja Dinas Ketenagakerjaan (Dokumen)	5	10.000.000	2	5.020.500	1	2.000.000		-	1	1.627.500		-		-	1	1.627.500	3	6.648.000	60,00	66,48		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tertelaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	60	32.000.000	24	8.000.000	12	4.000.000		-	6	2.000.000	3	1.000.000	3	798.000	12	3.798.000	36	11.798.000	60,00	36,87		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tertelaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Bulan)	60	14.337.456.599	24	5.364.383.884	12	2.662.491.200	3	401.155.355	3	626.663.962	3	818.699.169	3	616.823.659	12	2.463.342.145	36	7.827.726.029	60,00	54,60		

	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Terselanjutnya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2022 (Bulan)	60	14.116.700.599	24	5.278.780.984	12	2.618.340.000	3	401.155.355	3	604.890.862	3	808.626.369	3	604.890.859	12	2.419.563.445	36	7.698.344.429	60,0	54,5
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terselanjutnya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2022 (Bulan)	60	210.756.000	24	80.582.400	12	42.151.200		-	6	20.145.600	3	10.072.800	3	11.932.800	12	42.151.200	36	122.733.600	60,0	58,2
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terselanjutnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2022 (Bulan)	5	10.000.000	2	5.020.500	1	2.000.000		-	1	1.627.500		-		-	1	1.627.500	3	6.648.000	60,0	66,4
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselanjutnya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bulan)	60	950.398.800	24	431.320.854	12	177.573.800		-	6	85.669.510	3	41.187.600	3	46.323.390	12	173.180.500	36	604.501.354	60,0	63,6
	Penyelesaian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terselanjutnya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor (Bulan)	60	29.996.500	24	19.998.000	12	5.000.000		-	6	2.100.500		-	6	2.850.000	12	4.950.500	36	24.948.500	60,0	83,1
	Penyelesaian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselanjutnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bulan)	60	111.341.300	24	33.168.000	12	30.998.600		-	6	16.701.350	3	8.120.600	3	5.385.050.00	12	30.207.000	36	6.3375.000	60,0	56,9
	Penyelesaian Peralatan Rumah Tangga	Terselanjutnya Peralatan Rumah Tangga (Bulan)	60	32.883.100	24	13.875.000	12	6.221.000		-	6	3.105.100		-	6	2.991.400	12	6.096.500	36	19.971.500	60,0	60,7
	Penyelesaian Barang Cerdan dan Penggantian	Terselanjutnya Barang Cerdan dan Penggantian (Bulan)	60	54.447.500	24	23.093.500	12	12.267.200		-	6	4.746.250	3	2.400.500	3	2.345.750	12	9.492.500	36	32.586.000	60,0	59,8
	Penyelesaian Bahan Bacaan dan Peralatan Pertukang Utdaengan	Terselanjutnya Bahan Bacaan dan Peralatan Pertukang Utdaengan (Bulan)	60	47.010.400	24	23.010.400	12	7.012.000		-	6	3.506.000	3	1.753.000	3	1.521.000	12	6.780.000	36	29.790.400	60,0	63,3
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselanjutnya Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD (Bulan)	60	674.720.000	24	318.175.954	12	116.075.000		-	6	55.510.310	3	28.913.500	3	31.230.190	12	115.654.000	36	433.829.954,0	60,0	64,3
	Penyelesaian Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Terselanjutnya Penyelesaian Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Bulan)	60	661.050.200	24	303.180.344		163.998.500		-	6	76.250.734	3	37.627.367	3	38.622.366	12	152.500.467	36	435.680.811	60,0	68,9
	Penyelesaian Jasa Surat Menyurat	Terselanjutnya Jasa Surat Menyurat (Bulan)	60	11.998.000	24	9.996.000	12	2.000.000		-	6	996.000.00		-	6	995.000	12	1.991.000	36	11.987.000	60,0	93,9

	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik (Bulan)	60	135.574,600	24	41.184,344	12	29.998,500		-	6	9,254,734	3	4,627,367	3	4,627,366	12	18.509,467	36	59.693,811	60,00	44,03
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Dinas Keenagakerjaan (Bulan)	60	513,477,600	24	252,000,000	12	132,000,000		-	6	66,000,000	3	33,000,000	3	33,000,000	12	132,000,000	36	384,000,000	60,00	74,78
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertaksamananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	60	510,989,800	24	85,758,594	12	80,973,800		-	6	10,380,830	3	4,872,152	3	61,327,128	12	76,580,110	36	162,338,704	60,00	31,77
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kondisi Kendaraan Dinas yang Layak Pakai di Dinas Keenagakerjaan (Bulan)	60	158,960,800	24	66,858,594	12	22,313,800		-	6	10,380,830	3	4,872,152	3	3,075,628	12	18,328,610	36	85,187,204	60,00	53,59
	Pemeliharaan/Rohabilisasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kondisi Gedung Kantor Layak (Bulan)	60	309,000,000	12	6,300,000	12	49,000,000		-		-		-	12	48,621,500	12	48,621,500	24	54,921,500	40,00	17,77
	Pemeliharaan/Rohabilisasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Layak Pakai (Bulan)	Kondisi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Layak Pakai (Bulan)	60	43,029,000	24	12,600,000	12	9,660,000		-		-		-	12	9,630,000	12	9,630,000	36	22,230,000	60,00	51,66
2	Meningkatkan Perlindungan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)	97,43	154,000,000	97,06	99,477,950	97,12	40,000,000		-	97,09	18,360,225	97,11	17,008,900	97,12	3,231,375	1,40	38,600,500	98,46	138,078,450	101,06	89,66
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSentase PENYAMPAIN INFORMASI KESEMPATAN KERJA (%)	100	19,014,300	100	99,477,950	100	40,000,000		-	25	18,360,225	25	17,008,900	25	3,231,375	25	38,600,500	100	138,078,450	100	43,28
	Pelaksanaan Amertkerja di Daerah		2500	319,014,300	200	99,477,950	500	40,000,000		-	1056	18,360,225	978	17,008,900	186	3,231,375	2220	38,600,500	2420	138,078,450	96,78	43,28
	Pelaksanaan Antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Tertayang (Orang)	2500	319,014,300	200	99,477,950	500	40,000,000		-	1056	18,360,225	978	17,008,900	186	3,231,375	2220	38,600,500	2420	138,078,450	96,78	43,28
3	Meningkatkan SDM (Keterampilan) Pencari Kerja	Cakupan Pencari Kerja yang Telah Bekerja dan Mandiri Setelah Dilatih (%)	81,25	2,559,469,277	54,74	996,860,470	65,52	506,153,350		-	60,64	277,119,303	63,47	132,875,910	65,39	89,945,397	24,79	499,940,610	79,53	1,496,801,080	97,88	58,48
		Cakupan Pencari Kerja yang Memperoleh Pelatihan/Keterampilan (%)	40,00		12,50		29,00			21,53		25,87		28,80		16,35			28,85		72,13	

	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE PENCANAN YANG MEMPEROLEH PELATIHAN/KETRAMPILAN (%)	40,00	2.559.469.277	12,50	996.860.470	29,00	506.153.350		-	21,53	277.119.303	25,87	132.875.910	28,80	89.945.397	16,35	499.940.610	28,85	1.496.801.080	72,13	58,48
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi (Pelatihan)	27	2.559.469.277	10	996.860.470	4	506.153.350		-	2	277.119.303	1	132.875.910	1	89.945.397	4	499.940.610	14	1.496.801.080	51,85	58,48
	Proses Pelaksanaan Pelatihan dan Pembinaan Ketenagapilhan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan dan Pembinaan Ketenagapilhan bagi Pencari Kerja (Pelatihan)	27	.559.469.277	10	996.860.470	4	506.153.350		-	2	277.119.303	1	132.875.910	1	89.945.397	4	499.940.610	14	1.496.801.080	51,85	58,48
4	Memperkuat Perlindungan Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Cakupan Tenaga Kerja Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	5,16	405.256.700	4,63	187.803.900	4,77	56.837.800		-		-		-	4,76	53.892.000	0,01	53.892.000	3,01	241.695.900	58,33	59,64
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	CAKUPAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJ AAN (%)	50,16	405.256.700	35,24	187.803.900	35,35	56.837.800		-		-		-	35,34	53.892.000	0,01	53.892.000	34,79	241.695.900	69,36	59,64
	Pengembangan Peraturan Perusahaan dan Peningkatan Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Peraturan Perusahaan/Perd aan Jumlah Perusahaan di Kabupaten Tapulut Utara (Perusahaan)	75	240.668.900	23	178.282.650	15	14.999.800		-		-		-	15	14.815.000	15	14.815.000	38	193.097.650	50,67	80,23
	Pengembangan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan/Perd aan Jumlah Perusahaan di Kabupaten Tapulut Utara (Perusahaan)	75	240.668.900	23	178.282.650	15	14.999.800		-		-		-	15	14.815.000	15	14.815.000	38	193.097.650	50,67	80,23

[illegible]

TABEL 2.3
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 s/d TRIWULAN III

PERANGKAT DAERAH : DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Program/Sub Kegiatan	Target Kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Kinerja Pada Tahun 2022 per Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah yang dielevaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah s/d tahun 2022			
						I	II	III	IV	12				13 = 6 + 12							14=13/5x100%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5x100%	
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Unsur Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			19.313.913,076	2.349.272,730	3.932.217,505	401.155.355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401.155.355	2.750.428,085	-	-		
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Kepegawaian		Nilai Hasil Revisi AKIP (Nilai)	85,00	16.195.187,099	54,90	472.697,300	70,80	3.389.431,605									401.155.355	873.852,655	0,00	5,40		
			Persentase Temuan BPK dan Inspektorat yang dihindari (%)	100,00	100	100															0,00		
	PROGRAM PENGUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	16.195.187,099	100	472.697,300	100	3.389.431,605	11,84	401.155.355							401.155.355	873.852,655	11,84	5,40			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		60	10.000,000	36	6.648,000	12	2.000,000		-							0	0	36	6.648,000	60,00	66,48	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD		5	10.000,000	3	6.648,000	1	2.000,00									0	0	3	6.648,000	60,00	66,48	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		60	14.337.456,599	36	7.825.866,029	12	2.990.124,405	3	401.155,355							3	401.155,355	39	8.227.021,394	65,00	57,38	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2022 (Bulan)	60	14.116.700,599	36	7.698.344,429	12	2.945.973,205	3	401.155,355									3	401.155,355	39	8.099.499,784	65,00	57,38
	Pelaksanaan Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2022 (Bulan)	60	210.756,000	36	120.873,600	12	42.151,200											0	-	36	120.873,600	60,00	57,35
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tetapkannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2022 (Bulan)	5	10.000,000	3	6.648,000	1	2.000,000											0	0	3	6.648,000	60,00	66,48
	Administrasi Umum Pengadit Daerah	Tetapkannya Administrasi Umum Pengadit Daerah (Bulan)	60	903.308,400	36	574.710,954	12	173.596,500		-									0	-	36	574.710,954	60,00	63,62
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bulan)	60	29.996,500	36	24.948,500	12	4.999,000											0	-	36	24.948,500	60,00	83,17
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bulan)	60	111.341,300	36	63.375,000,00	12	19.997.400,00											0	-	36	63.375,000	60,00	56,92
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Bulan)	60	32.883,100	36	19.971,500	12	6.220,700											0	-	36	19.971,500	60,00	60,73
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (Bulan)	60	54.447,500	36	32.586,000	12	8.164,400											0	-	36	32.586,000	60,00	59,85
	Penyediaan Rapor Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapor Koordinasi dan Konsultasi OPD (Bulan)	60	674.720,000	36	433.829,954	12	134.615,000											0	-	36	433.829,954	60,00	64,30
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tetapkannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bulan)	60	81.302,100	12	267.338,723	0	27.100,700											0	0	12	267.338,723	20,00	328,82
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya di Dinas Ketenagakerjaan (Bulan)	60	81.302,100	12	267.338,723	12	27.100,700											0	0	12	267.338,723	20,00	328,82

	Penyediaan jasa Penyediaan Usaha Pemertintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penyediaan Usaha Pemertintahan Daerah (Bulan)	60	661.050.200	36	455.680.811	154.684.200												0	-	36	455.680.811	60,00	68,93
	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Terseadinya jasa Surat Menyurat (Bulan)	60	11.998.000	36	11.987.000	1.500.000												0	-	36	11.987.000	60,00	99,91
	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terseadinya jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik (Bulan)	60	135.574.600	36	59.693.811	12	26.025.000											0	-	36	59.693.811	60,00	44,03
	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Terseadinya jasa Pelayanan Umum Kantor (Bulan)	60	513.477.600	36	384.000.000	12	127.159.200											0	-	36	384.000.000	60,00	74,78
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemertintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemertintahan Daerah (Bulan)	60	201.989.800	36	107.417.204	12	41.525.800											0	-	36	107.417.204	60,00	53,18
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kondisi Kendaraan yang Layak Pakai di Dinas Ketenagakerjaan (Bulan)	60	158.960.800	36	85.187.204	12	32.504.800											0	-	36	85.187.204	60,00	53,99
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kondisi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Layak Pakai (Bulan)	60	43.029.000	36	22.230.000	12	9.021.000											0	0	36	22.230.000	60,00	51,66
2	Meningkatkan Pertuasan Kesenpatan Kerja bagi Pencari Kerja	Tingkat Kesenpatan Kerja (TKK) (%)	97,43	154.000.000	98,46	138.078.450	97,23	20.000.000											0	0	98,46	138.078.450	101,06	89,66
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	CAKUPAN PENEMPATAN TENAGA KERJA (%)	2,89	319.014.300	1,74	138.078.450	2,50	20.000.000											0	0	1,74	138.078.450	60,21	43,28
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		2.500	319.014.300	372	138.078.450	500	20.000.000											0	0	372	138.078.450	14,88	43,28
	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Terlayani (Orang)	2.500	319.014.300	372	138.078.450	500	20.000.000											0	0	372	138.078.450	14,88	43,28
3	Meningkatkan SDM (Keterampilan) Pencari Kerja	Cakupan Pencari Kerja yang Telah Bekerja dan Mundi Setelah Dilatih (%)	81,25	2.559.469.277	79,62	1.496.801.080	67,07	470.000.000											0	0	79,62	1.496.801.080	97,99	58,48

		Cakupan Pencari Kerja yang Memperoleh Pelatihan/Keterampilan (%)	40,00	29,00	1.496.801,080	32,80	470.000,000											0	0	29,00	1.496.801,080	72,50	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE PENCARI KERJA YANG MEMPEROLEH PELATIHAN/KETERAMPILAN (%)	40,00	29,00	2.559.469,277	32,80	470.000,000											0	0	29,00	1.496.801,080	72,50	58,48
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi (Pelatihan)	27	14	2.559.469,277	6	470.000,000											0	0	14	1.496.801,080	51,85	58,48
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi Penerima Kerja Berdasarkan Kompetensi	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi Penerima Kerja (Pelatihan)	27	14	2.559.469,277	6	470.000,000											0	0	14	1.496.801,080,00	51,85	58,48
4	Meningkatkan perlindungan Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Cakupan Terapa jaman Sosial Ketenagakerjaan n (%)	5,16	3,01	405.256,700	4,90	52.785,900											0	0	3	241.695,900	50,33	59,64
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	CAKUPAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJ AAN (%)	50,16	34,79	405.256,700	44,33	52.785,900											0	0	35	241.695,900	69,36	59,64
	Pengesaan Penurunan Pendaftaran dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah/Kota	75	38	240.688,900	15	39.786,100												0	0	38	193.097,650	50,67	80,23
	Pengesaan Penurunan Perusahaan/Pend arian jumlah Perusahaan di Kabupaten Tapanuli Utara (Perusahaan)	75	38	240.688,900	15	39.786,100												0	0	38	193.097,650	50,67	80,23

[illegible]

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2021 didasarkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disajikan pada tabel berikut ini :

TABEL 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target							Realisasi		
1	2	3	4	5	6	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021		
1	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)			Persen	83,95	83,96	82,23	82,25	82,29	81,78	81,82	82,63		
			Meningkatkan SDM (Keterampilan) Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Memperoleh Pelatihan/Keterampilan	Persen	70,81	29,00	40,00	41,82	42,11	69,91	12,50	29,00		
				Persentase Pencari Kerja yang Telah Bekerja dan Mandiri Setelah Dilatih	Persen	43,80	65,52	80,00	80,43	80,83	50,63	54,74	79,62		
			Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persen	98,69	97,12	98,57	98,68	98,79	98,67	97,06	98,46		
			Meningkatkan Perlindungan Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persentase Tenaga Kerja Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	3,89	4,77	4,90	5,03	5,16	2,36	4,63	3,01		
			Meningkatkan Sumberdaya Manusia Warga Transmigrasi	Persentase Warga Transmigrasi yang dibina untuk Meningkatkan SDM (Keterampilan)	Persen	10	10	10	20	20	50	50	10		
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	65,00	65,80	72,00	78,00	81,00	61,13	54,90	68,15				

Dari data yang disajikan pada Tabel 2.4 diatas, secara umum apabila disandingkan antara target dengan realisasi pada tahun 2020-2021 masih menunjukkan grafik yang naik turun jika berpatokan pada realisasi tahun dasar 2019. Hal ini akibat dari terjadinya Covid-19 pada akhir tahun 2019 yang melanda dunia termasuk Indonesia dan sampai saat ini dampaknya masih sangat terasa dalam kehidupan perekonomian badan usaha mulai dari yang skala mikro sampai yang skala besar.

Salah satu dampak yang dirasakan adalah banyaknya perusahaan (badan usaha) yang mengurangi jumlah pegawai/karyawan ataupun perusahaan tidak merekrut pegawai baru selama rentang tahun 2020-2021. Di sisi lain, untuk dapat membantu perekonomian masyarakat Indonesia, pemerintah sejak tahun 2020 menggelontorkan anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional. Hal ini berimplikasi pada terjadi efisiensi dan refocussing anggaran pada setiap instansi pemerintah khususnya di Kabupaten Tapanuli Utara. Walaupun demikian, dengan memanfaatkan efisiensi mungkin anggaran yang diterima, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara tetap melakukan kinerja yang sebisa mungkin terbaik untuk dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja agar dapat berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja baru.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja merupakan salah satu cara untuk menciptakan calon-calon tenaga kerja yang handal dan kapabel dalam bidang tertentu. Hal ini bertujuan untuk dapat memenuhi permintaan pasar terhadap tenaga kerja yang berkompeten disamping diperlukan perluasan dan penempatan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan.

Menurut data BPS Kabupaten Tapanuli Utara, jumlah pengangguran di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2021 adalah sebanyak 2.711 orang dengan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 1,54%. Hal ini disebabkan oleh karena masih banyaknya angkatan kerja (penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran) yang kurang/belum memiliki keterampilan/keahlian sebagai tenaga kerja terampil yang dibutuhkan bursa kerja. Inilah yang menjadi titik fokus dalam pemberdayaan sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Tapanuli Utara.

Selain karena kurangnya keterampilan/keahlian yang dimiliki, minat untuk berwirausaha juga masih rendah. Hal ini diakibatkan oleh karena keterbatasan permodalan yang dimiliki untuk dapat memulai usaha walaupun telah mengikuti

pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara. Pada umumnya para pencari kerja masih berharapan dan bergantung pada lowongan kerja.

2.3.2. Tantangan dan Peluang

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threat*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang-peluang (*Opportunities*) diantaranya :

1. Banyaknya angkatan kerja lulusan SLTA;
2. Perusahaan yang dapat bermitra dengan Dinas Ketenagakerjaan;
3. Adanya integrasi program dengan pemerintah baik Kementerian maupun tingkat Provinsi;
4. Sudah terdapat Himpunan Perundangan Ketenagakerjaan;
5. Pendidikan khusus untuk pendidikan teknis pengantar kerja;
6. Peningkatan SDM untuk Tenaga Instruktur;
7. Tersedianya lahan penyiapan permukiman transmigrasi dan penduduk setempat;
8. Tingkat kemandirian warga transmigrasi;
9. Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pusat.

Selain itu, analisa lingkungan eksternal mengingatkan kepada tantangan (*treaths*) diantaranya :

1. Banyaknya jumlah tenaga kerja yang sudah bekerja namun tidak memiliki keterampilan;
2. Budaya masyarakat untuk membuat kesepakatan bersama dalam pembangunan masih lemah;
3. Banyaknya perusahaan yang belum menjalankan UU No. 13 Tahun 2003;
4. Rendahnya kesadaran perusahaan melaksanakan peraturan;
5. Sistem kontrak kerja outsourcing menyebabkan terjadinya PHK;
6. Rendahnya SDM Tenaga Kerja Lokal;
7. Rendahnya kualitas Pemukiman Transmigrasi (Banjir, Bencana Alam);
8. Status kepemilikan lahan Transmigrasi.

Analisa SWOT dilakukan untuk mengkaji kekuatan (*Strenght*) dan peluang (*Opportunity*) yang dimiliki dibandingkan dengan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threat*) yang dihadapi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara.

Matriks Analisa SWOT

			INTERNAL	
			Kekuatan (<i>Strenght</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
			- Dinas Ketenagakerjaan memiliki UPT. Balai Latihan Kerja; - Program kerjasama dengan pihak swasta/mitra; - Tersedianya instruktur; - Kelembagaan (khususnya aturan) pengawasan sudah ada; - Pimpinan memberikan kebebasan kepada staf untuk menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya dan wewenangnya (terutama petugas teknis).	- Kurangnya tenaga teknis pengantar kerja; - Tenaga Instruktur yang masih kurang dengan aneka SDM; - Jaringan ke perusahaan masih terbatas; - Belum terbentuknya forum jejaring pemagangan; - Masih terbatasnya SDM Pegawai terutama dalam penggunaan jaringan internet dalam pelaksanaan tugas; - Kurang tenaga teknis pengawas; - Tidak ada tenaga mediasi tenaga kerja.
E K S T E R N A L	Peluang (<i>Opportunity</i>)	- Banyaknya angkatan kerja lulusan SLTA; - Perusahaan yang dapat bermitra dengan Dinas Ketenagakerjaan; - Adanya integrasi program dengan pemerintah baik Kementerian maupun tingkat Provinsi; - Sudah terdapat Himpunan Perundangan Ketenagakerjaan; - Pendidikan khusus untuk pendidikan teknis pengantar kerja; - Peningkatan SDM untuk Tenaga Instruktur; - Tersedianya lahan penyiapan permukiman transmigrasi dan penduduk setempat; - Tingkat kemandirian warga transmigrasi; - Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pusat.	- Semakin meningkatkan kerjasama dengan lembaga pelatihan swasta dalam peningkatan keterampilan lulusan SLTA; - Semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas instruktur UPT. Balai Latihan Kerja	- Mengajukan penambahan tenaga teknis pengantar kerja; - Semakin meningkatkan kualitas tenaga teknis pengantar kerja yang ada
	Tantangan (<i>Threat</i>)	- Banyaknya jumlah tenaga kerja yang sudah bekerja namun tidak memiliki keterampilan; - Budaya masyarakat untuk membuat kesepakatan bersama dalam pembangunan masih lemah; - Banyaknya perusahaan yang belum menjalankan UU No. 13 Tahun 2003; - Rendahnya kesadaran perusahaan melaksanakan peraturan; - Sistem kontrak kerja outsourcing menyebabkan terjadinya PHK; - Rendahnya SDM Tenaga Kerja Lokal; - Rendahnya kualitas Pemukiman Transmigrasi (Banjir, Bencana Alam); - Status kepemilikan lahan Transmigrasi.	- Semakin meningkatkan pembinaan bagi perusahaan-perusahaan untuk senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan; - Semakin meningkatkan keterampilan/keahlian tenaga kerja lokal	- Memanfaatkan pegawai yang menguasai internet dalam mengakses peraturan perundang-undangan

2.3.3. Isu-isu Penting

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara mengelola 2 (dua) urusan yaitu Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan tenaga kerja merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan transmigrasi merupakan urusan pilihan.

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Adapun yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yaitu :

1. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
2. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
3. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
4. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil;
5. Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota;
6. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
7. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah Kabupaten/Kota;
8. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota;
9. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
10. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
11. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota;
12. Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah Kabupaten/Kota;
13. Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
14. Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

Dengan memperhatikan tugas dan kewenangan dinas serta hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut :

- a. Keterampilan/keahlian tenaga kerja sebagai tenaga kerja terampil masih kurang;
- b. Pertumbuhan angkatan kerja tidak seimbang dengan penyediaan lapangan kerja;
- c. Minat tenaga kerja untuk berwirausaha masih rendah;

- d. Masih rendahnya kesadaran pemberi kerja untuk mendaftarkan tenaga kerja menjadi peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK).

2.4. Review terhadap RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Dengan melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Dengan berdasarkan beberapa pertimbangan yang ada baik dari tingkat pusat, provinsi maupun daerah, maka arah pembangunan pada sektor tenaga kerja dan transmigrasi tahun 2023 yang ditetapkan adalah:

1. Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi;
2. Peningkatan jumlah pencari kerja yang ditempatkan/memiliki pekerjaan;
3. Peningkatan jumlah tenaga kerja yang terdaftar pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Review terhadap RKPD tahun 2023 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.5.

TABEL 2.5
REVIEW TERHADAP RKPd TAHUN 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	RKPD		Hasil Analisa Kebutuhan		Catt
				Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja					4.680.000.000,00		4.676.714.770,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG Mendukung KELANCARAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH (%)	100	3.990.000.000,00	100	3.986.714.770,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja SKPD (Dokumen)	3	67.000.000,00	3	66.999.700,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	1	5.000.000,00	1	4.999.900,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	12	12.000.000,00	12	11.999.800,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Bulan)	12	3.110.200.000,00	12	3.109.347.100,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	25	3.063.000.000,00	25	3.063.000.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	42.200.000,00	4	41.347.200,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1	5.000.000,00	1	4.999.900,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bulan)	12	333.000.000,00	12	332.986.100,00	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	20.000.000,00	4	19.999.200,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	31.000.000,00	4	30.000.600,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	12.000.000,00	4	11.999.600,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	26.000.000,00	4	25.999.900,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	11	12.000.000,00	11	11.996.800,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Kab. Taput	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	280	232.000.000,00	280	231.991.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Unit)	12	133.600.000,00	12	133.059.800,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	133.600.000,00	12	133.059.800,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	12	161.200.000,00	12	161.158.600,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	30.000.000,00	12	29.999.400,00	
Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	127.200.000,00	12	127.159.200,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	12	185.000.000,00	12	183.163.470,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya (Unit)	9	40.000.000,00	9	39.993.870,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	130.000.000,00	1	128.512.600,00	

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dismaker Kab. Taput	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	18	15.000.000,00	18	14.657.000,00	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		PERSENTASE PENYAMPAIAN INFORMASI KESEMPATAN KERJA (%)	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	
Pelayanaan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pencari Kerja yang Terlayani (Orang)	600	30.000.000,00	600	30.000.000,00	
Pelayanaan Antar Kerja	Dismaker Kab. Taput	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	500	20.000.000,00	500	20.000.000,00	
Perluasan Kesempatan Kerja	Dismaker Kab. Taput	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		PERSENTASE PENCARI KERJA YANG MEMPEROLEH PELATIHAN/KETERAMPILAN (%)	41,82	600.000.000,00	41,82	600.000.000,00	
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi (Pelatihan)	6	570.000.000,00	6	570.000.000,00	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Taput	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	64	570.000.000,00	64	570.000.000,00	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (Lembaga)	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Taput	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		PERSENTASE PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN (%)	46,28	60.000.000,00	46,28	60.000.000,00	
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Perusahaan/Pendataan Jumlah Perusahaan di Kabupaten Tapanuli Utara (Perusahaan)	15	40.000.000,00	15	40.000.000,00	
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Taput	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLPK Online (Perusahaan)	15	40.000.000,00	15	40.000.000,00	

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	
		Jumlah Tenaga Kerja Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Orang)	3600		3600		
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Taput	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Taput	Tertaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	3600	10.000.000,00	3600	10.000.000,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai suatu institusi yang berhubungan langsung dengan masyarakat tentunya menerima usulan dan masukan program/kegiatan demi memajukan sektor tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten Tapanuli Utara dari kelompok masyarakat maupun para *stakeholders* lainnya.

Semua usulan disesuaikan dengan target RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 serta tugas pokok dan fungsi dari setiap bidang yang ada pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana terlihat pada Tabel 2.6.

TABEL 2.6
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2023

No	Program / Kegiatan	Pengusul	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2		3	4	5	6
A	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Persentase Pencari Kerja yang Meperoleh Pelatihan/ Keterampilan		
1	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi			Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		
a	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		
	- Pelatihan Keliling (Mobile Training Unit) Pembuatan Pupuk Organik, Pakan Ternak dan Pembuatan Kotak Madu di 15 Kecamatan	Asima Ruth Lumbantobing	Desa Hutatoruan IV Kec. Tarutung		800.000,00	Usulan dapat diterima dengan memperhatikan urgenitas kebutuhan di lokasi
	- Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Menjahit	Candra Panama Sianturi	Desa Parsaoran Nainggolan Kec. Pahae Jae		800.000,00	Usulan dapat diterima dengan memperhatikan kriteria/kualifikasi calon peserta yang akan diikutsertakan dan pelatihan akan diselenggarakan di BLK Silangkitang
	- Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Menjahit	Edison Pandapotan Sihite	Desa Siraja Oloan Kec. Tarutung		800.000,00	Usulan dapat diterima dengan memperhatikan kriteria/kualifikasi calon peserta yang akan diikutsertakan dan pelatihan akan diselenggarakan di BLK Silangkitang

	- Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Processing/ Pengolahan Hasil Pertanian	Edison Pandapotan Sihite	Desa Siraja Oloan Kec. Tarutung		800.000,00	Usulan dapat diterima dengan memperhatikan kriteria/kualifikasi calon peserta yang akan diikutsertakan dan pelatihan akan diselenggarakan di BLK Silangkitang
	- Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Menjahit	Jonter Simanungkalit	Desa Simanungkalit Kec. Sipoholon		800.000,00	Usulan dapat diterima dengan memperhatikan kriteria/kualifikasi calon peserta yang akan diikutsertakan dan pelatihan akan diselenggarakan di BLK Silangkitang
	- Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Processing/ Pengolahan Hasil Pertanian	Lalo S. Simanjuntak	Desa Onan Runggu I Kec. Sipahutar		800.000,00	Usulan dapat diterima dengan memperhatikan kriteria/kualifikasi calon peserta yang akan diikutsertakan dan pelatihan akan diselenggarakan di BLK Silangkitang
	- Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Menjahit	Marto Manalu	Desa Pertengahan Kec. Parmonangan		800.000,00	Usulan dapat diterima dengan memperhatikan kriteria/kualifikasi calon peserta yang akan diikutsertakan dan pelatihan akan diselenggarakan di BLK Silangkitang
	- Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Menjahit	Saltur Hutabarat	Desa Pagar Batu Kec. Sipoholon		800.000,00	Usulan dapat diterima dengan memperhatikan kriteria/kualifikasi calon peserta yang akan diikutsertakan dan pelatihan akan diselenggarakan di BLK Silangkitang
	- Pelatihan Keliling (Mobile Training Unit) Pembuatan Pupuk Organik, Pakan Ternak dan Pembuatan Kotak Madu di 15 Kecamatan	Sumitro Sitompul	Desa Sigurunggurung Kec. Pahae Jae		800.000,00	Usulan dapat diterima dengan memperhatikan urgenitas kebutuhan di lokasi
	- Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Processing/ Pengolahan Hasil Pertanian	Tohom Mangihut Hutaeruk	Desa Hutaeruk Hasundutan Kec. Sipoholon		800.000,00	Usulan dapat diterima dengan memperhatikan kriteria/kualifikasi calon peserta yang akan diikutsertakan dan pelatihan akan diselenggarakan di BLK Silangkitang
	- Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Processing/ Pengolahan Hasil Pertanian	Maradona Simanjuntak, A.Md (Fraksi Partai Nasdem)	Kec. Sipahutar		800.000,00	Usulan dapat diterima dengan memperhatikan kriteria/kualifikasi calon peserta yang akan diikutsertakan dan pelatihan akan diselenggarakan di BLK Silangkitang

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu arah pembangunan jangka panjang bidang SDM yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 adalah peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja. Sedangkan secara khusus, peningkatan kualitas SDM dititikberatkan pada :

- » Peningkatan kualitas tenaga kerja, melalui perubahan orientasi pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis, untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi SDM, dan memenuhi struktur kebutuhan tenaga kerja yang diharapkan oleh industri.
- » Penyediaan tenaga kerja terampil dan profesional melalui penyetaraan kualitas baku standar kompetensi tenaga kerja, untuk memenuhi sistem standar sertifikasi internasional dalam era global.

Peningkatan kualitas calon tenaga kerja dan tenaga kerja diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja terhadap tenaga kerja yang berkompetensi dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi. Dalam hal agenda pembangunan Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas ditujukan dalam rangka meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan sasaran utama peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.

Secara nasional, permasalahan yang terjadi pada sektor tenaga kerja adalah sebagai berikut :

1. Kualitas tenaga kerja Indonesia masih jauh tertinggal dari negara lain di Asean dan OECD.
2. Jumlah pengangguran terdidik di Indonesia semakin meningkat.
3. Permasalahan ketenagakerjaan dalam menyongsong era automasi yang mengarah ke revolusi industri 4.0.
4. Permasalahan pengawasan tenaga kerja.
5. Jiwa kewirausahaan pemuda Indonesia masih rendah.

Berbagai upaya penanganan permasalahan nasional tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan RPJMN 2019-2024 yang berfokus pada peningkatan daya saing tenaga kerja dan hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel. Arah kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan ditujukan dalam rangka

mewujudkan "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan". Arah kebijakan yang digunakan dapat dirangkum dalam suatu skenario peningkatan daya saing tenaga kerja dan hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel dalam lima tahun ke depan seperti diuraikan secara ringkas sebagai berikut :

- a. Arah Kebijakan 1 : **Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas.** Upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas dilaksanakan dengan strategi :
 - 1) Meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi;
 - 2) Meningkatkan produktivitas pekerja;
 - 3) Meningkatkan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri;
 - 4) Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan;
 - 5) Melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja;
 - 6) Meningkatkan kompetensi instniktur dan tenaga kepelatihan;
 - 7) Meningkatkan produktivitas tenaga kerja;
 - 8) Menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

- b. Arah Kebijakan 2 : **Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja.** Upaya penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja dilaksanakan dengan strategi :
 - 1) Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan di dalam negeri;
 - 2) Meningkatkan perlindungan dalam penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri;
 - 3) Meningkatkan tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja;
 - 4) Meningkatkan jumlah wirausaha baru melalui inkubasi bisnis
 - 5) Melaksanakan pengendalian tenaga kerja asing (TKA) melalui pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel.

- c. Arah kebijakan 3 : **Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan.** Upaya perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan dengan strategi:
 - 1) Meningkatkan kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan;
 - 2) Meningkatkan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - 3) Meningkatkan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak;
 - 4) Meningkatkan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja;

- 5) Meningkatkan kualitas dan pengelolaam keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 6) Menurunkan tingkat risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
- d. Arah Kebijakan 4 : **Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.** Upaya pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja dilaksanakan dengan strategi:
- 1) Meningkatkan kuantitas/kualitas kelembagaan hubungan industrial;
 - 2) Meningkatkan penerapan kebijakan tentang pengupahan serta struktur dan skala upah;
 - 3) Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - 4) Meningkatkan perlindungan hak bagi pekerja/buruh dan pengusaha melalui pengaturan syarat kerja;
 - 5) Meningkatkan program, manfaat, dan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

TABEL 3.1
IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN

No	Kebijakan Nasional/Provinsi/Kabupaten
A. Nasional	
1	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
2	Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
3	Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
4	Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
B. Provinsi	
1	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja
2	Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
3	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial
4	Meningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja
5	Terwujudnya permukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak
6	Berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing
C. Kabupaten	

1	Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja
2	Meningkatkan promosi lapangan kerja
3	Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan swasta untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024, maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara sesuai yang tercantum dalam Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 adalah Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Angkatan Kerja dengan indikator tujuan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

3.2.2. Sasaran

Tujuan yang akan diwujudkan tersebut selanjutnya dirinci pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran tahunan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara ini menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan serta perubahan perbaikan kondisi sektor tenaga kerja dan transmigrasi yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut. Selanjutnya bagian berikut akan menjelaskan dan merinci masing-masing tujuan yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang (2020-2024) beserta sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan SDM (Keterampilan) Pencari Kerja.
2. Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja.
3. Meningkatkan Perlindungan Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Warga Transmigrasi.
5. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan.

Untuk selengkapnya, tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.2.

TABEL 3.2
TUJUAN, SASARAN DAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Target		
						2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)			Persen	81,78	81,82	82,63	82,23	82,25	82,29
			Meningkatkan SDM (Keterampilan) Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Memperoleh Pelatihan/Keterampilan	Persen	69,91	12,50	29,00	40,00	41,82	42,11
				Persentase Pencari Kerja yang Telah Bekerja dan Mandiri Setelah Dilatih	Persen	50,63	54,74	79,62	80,00	80,43	80,83
			Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persen	98,67	97,06	98,46	98,57	98,68	98,79
			Meningkatkan Perlindungan Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persentase Tenaga Kerja Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	2,36	4,63	3,01	4,90	5,03	5,16
			Meningkatkan Sumberdaya Manusia Warga Transmigrasi	Persentase Warga Transmigrasi yang dibina untuk Meningkatkan SDM (Keterampilan)	Persen	50	50	10	10	20	20
			Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	61,13	54,90	68,15	72,00	78,00	81,00

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Semakin tinggi TPAK, berarti semakin besar pula keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas ke dalam pasar. Perhitungan nilai TPAK ini dilakukan oleh BPS. Realisasi TPAK pada tahun 2021 adalah 82,63, dimana terjadi peningkatan setiap tahunnya mulai tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2022, diestimasi akan terjadi penurunan nilai TPAK di Kabupaten Tapanuli Utara. Hal ini berdasarkan perhitungan proyeksi bahwasanya terjadi peningkatan warga eksodus dari luar wilayah Kabupaten Tapanuli Utara yang kembali pulang (pulang kampung) akibat tidak lagi bekerja di daerah asalnya sehingga jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) meningkat sedangkan jumlah angkatan kerja kemungkinan tetap. Kemudian untuk tahun 2023-2024 ditargetkan akan kembali meningkat dari tahun 2022.

2. Persentase Pencari Kerja yang Memperoleh Pelatihan/Keterampilan

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja serta diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja. Pelatihan kerja dapat diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta. Selain itu, perhitungan tersebut tidak hanya terpaku pada sumber dana APBD Kabupaten Tapanuli Utara yang dikelola oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara akan tetapi oleh pihak-pihak lain yang menyelenggarakannya dengan cara mengutus tenaga kerja yang akan dilatih maupun pelaksanaan pelatihan yang instrukturnya berasal dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara.

Persentase Pencari Kerja yang Memperoleh Pelatihan/Keterampilan dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang Memperoleh Pelatihan/Keterampilan}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang Mendaftar}} \times 100\%$$

Realisasi pada tahun 2019-2021 menunjukkan grafik yang naik turun. Hal ini terjadi akibat dari adanya realokasi dan refocussing anggaran pada tahun 2020 dan 2021 sehingga berimplikasi pada jumlah paket pelatihan yang dapat dilaksanakan. Selain itu, pihak-pihak lain juga tidak ada yang melakukan pelatihan berbasis kompetensi sehingga tidak ada tenaga kerja yang dapat

diutus untuk mengikuti pelatihan. Dan untuk tahun 2022-2024 ditargetkan akan terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi mengingat situasi yang sudah mulai kondusif dari Covid-19.

3. Persentase Pencari Kerja yang Telah Bekerja dan Mandiri Setelah Dilatih
Setelah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi, diharapkan tenaga kerja tersebut dapat mandiri dan berwirausaha sehingga kelak akan dapat menciptakan lapangan kerja. Selama periode tahun 2019-2021 terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang mandiri setelah diikutsertakan dalam pelatihan. Hal ini terlihat dari peningkatan realisasi tahun 2019-2021. Atas dasar itulah, target untuk tahun 2022-2024 juga diharapkan dapat tercapai.

Persentase Pencari Kerja yang Telah Bekerja dan Mandiri Setelah Dilatih dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang Telah Bekerja dan Mandiri}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih}} \times 100\%$$

4. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan peluang seorang Penduduk Usia Kerja (PUK) yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Tingkat Kesempatan Kerja mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja. Dengan kata lain, semakin tinggi TKK maka kesempatan kerja semakin tinggi. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Realisasi pada tahun 2019-2021 menunjukkan grafik yang naik turun. Hal ini dapat terjadi oleh karena pada tahun 2020 merupakan puncak dari Covid-19 sehingga banyak terjadi pengurangan pekerja di perusahaan-perusahaan. Dampaknya adalah jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2020 menurun sedangkan jumlah angkatan kerja kemungkinan tetap.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) diperoleh dari perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Atau dapat dituliskan secara matematis:

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

5. Persentase Tenaga Kerja Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat

peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Dan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Program jaminan sosial tenaga kerja wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja. Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja meliputi :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- b. Jaminan Kematian;
- c. Jaminan Hari Tua; dan
- d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

6. Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara. Pada tahun 2021, terjadi penurunan Persentase Tenaga Kerja Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan mengalami penurunan pada tahun 2021. Hal ini menggambarkan bahwa di masa pandemi Covid-19, banyak usaha ataupun perusahaan yang mengalami pengurangan jumlah tenaga kerja. Akibatnya jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja juga mengalami penurunan. Adapun masa berlaku kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja tersebut hanyalah sepanjang tenaga kerja tersebut masih aktif melakukan pekerjaannya tersebut. Sehingga apabila masa kerja ataupun kontrak kerjanya telah selesai/habis, maka secara otomatis status kepesertaannya juga akan berakhir. Selain itu, pada umumnya masih banyak penduduk Kabupaten Tapanuli Utara yang bekerja dengan keluarganya sendiri sehingga tidak membutuhkan pendaftaran kepesertaan jaminan sosial bagi tenaga kerja. Di sisi lain, badan usaha/perusahaan masih banyak yang belum mendaftarkan tenaga kerja yang dimilikinya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Persentase Tenaga Kerja Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah Penduduk yang Bekerja}} \times 100\%$$

7. Persentase Warga Transmigrasi yang dibina untuk Meningkatkan SDM (Keterampilan)

Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi Permukiman Transmigrasi. Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Kawasan transmigrasi di Kabupaten Tapanuli Utara berlokasi di Desa Simpang Bolon Kec. Garoga yang dihuni oleh warga transmigran sebanyak 100 KK. Untuk meningkatkan kemandirian transmigran dilakukan lintas sektoral beberapa OPD melalui pembinaan warga transmigran sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Persentase Warga Transimigrasi yang Dibina untuk Meningkatkan SDM (Keterampilan) dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Transmigran yang Dibina}}{\text{Total Jumlah Transmigran}} \times 100\%$$

8. Nilai Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP bertujuan untuk menilai apakah target tahunan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak. Jika target tersebut tidak dapat dicapai, maka diperlukan upaya lebih lanjut agar di tahun berikutnya ketidakcapaian target tidak lagi terjadi.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasar pada Rencana Strategis tahun 2020-2024, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan 4 program dengan 11 kegiatan, dan 26 sub kegiatan yang bersumber dana DAU pada tahun 2023. Keseluruhan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Dari keempat program tersebut, yang menjadi program prioritas dalam peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja pada Rencana Kerja Dinas

Ketenagakerjaan Tahun 2022 adalah Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dialokasikan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.3 berikut :

TABEL 3.3
PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PADA RENJA TAHUN 2023

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		3	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				15	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
				16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	7	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	20	Pelayanan Antar Kerja
				21	Perluasan Kesempatan Kerja
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	8	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	22	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
		9	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	23	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	10	Pengesahan Peraturan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 minggu (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
		11	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	25	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
				26	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.1 pada Bab IV.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024 yaitu mendukung terwujudnya capaian pada misi keempat “Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui Pelatihan Tenaga Kerja, Pemanfaatan Iptek dan Pengembangan Kewirausahaan”, khususnya mendukung capaian pada tujuan Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM.

Rencana kerja dan kebutuhan pendanaan pada Rencana Kerja tahun 2023 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1.

TABEL 4.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
PADA RENJA TAHUN 2023

KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN			TAHUN 2023					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
					LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	10	13	15	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		4.676.714.770				4.790.000.000
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN LAYANAN PENUNJANG YANG TERTANGANI	100%	3.990.000.000		100%	3.985.000.000
2	7	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	66.999.700		3 Dokumen	62.000.000
2	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	50.000.000	DAU	6 Dokumen	45.000.000
2	7	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.999.900	DAU	1 Laporan	5.000.000

2	7	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dismaker Kab. Taput	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	11.999.800	DAU	12 Laporan	12.000.000
2	7	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.109.347.100		1 Dokumen	3.110.200.000
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dismaker Kab. Taput	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	3.063.000.000	DAU	25 Orang/Bulan	3.063.000.000
2	7	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dismaker Kab. Taput	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	41.347.200	DAU	12 Dokumen	42.200.000
2	7	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dismaker Kab. Taput	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.999.900	DAU	1 Laporan	5.000.000
2	7	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	332.986.100		12 Bulan	333.000.000
2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Dismaker Kab. Taput	Jumlah Paket Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	19.999.200	DAU	4 Paket	20.000.000
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dismaker Kab. Taput	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	30.000.600	DAU	4 Paket	31.000.000
2	7	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dismaker Kab. Taput	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	11.999.600	DAU	4 Paket	12.000.000
2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dismaker Kab. Taput	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	25.999.900	DAU	4 Paket	26.000.000
2	7	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dismaker Kab. Taput	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	11 Dokumen	11.996.800	DAU	11 Dokumen	12.000.000

2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Kab. Taput	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280 Laporan	231.991.000	DAU	280 Laporan	232.000.000
2	7	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	12 Unit	133.059.800		12 Unit	133.600.000
2	7	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dismaker Kab. Taput	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	133.059.800	DAU	12 Unit	133.600.000
2	7	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	161.158.600		12 Bulan	161.200.000
2	7	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dismaker Kab. Taput	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000	DAU	1 Laporan	4.000.000
2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dismaker Kab. Taput	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.999.400	DAU	12 Laporan	30.000.000
2	7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dismaker Kab. Taput	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	127.159.200	DAU	12 Laporan	127.200.000
2	7	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	183.163.470		12 Bulan	185.000.000
2	7	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dismaker Kab. Taput	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	39.993.870	DAU	9 Unit	40.000.000
2	7	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dismaker Kab. Taput	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 Unit	128.512.600	DAU	1 Unit	130.000.000

2	7	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	18 Unit	14.657.000	DAU	18 Unit	15.000.000
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		PERSENTASE PENCAIRI KERJA YANG MEMPEROLEH PELATIHAN/KETERAMPILAN	41,82%	600.000.000		42,11%	700.000.000
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	64 Orang	570.000.000		64 Orang	650.000.000
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Taput	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	64 Orang	570.000.000	DAU	64 Orang	650.000.000
2	7	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	2 Lembaga	30.000.000		2 Lembaga	50.000.000
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Taput	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	2 Lembaga	30.000.000	DAU	2 Lembaga	50.000.000
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		PERSENTASE PENYAMPAILAN INFORMASI KESEMPATAN KERJA	100,00%	30.000.000		100,00%	40.000.000
2	7	4	2.01		Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pencari Kerja yang Terlayani	600 Orang	20.000.000		600 Orang	40.000.000
2	7	4	2.01	2	Pelayanan Antar Kerja	Kab. Taput	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	500 Orang	20.000.000	DAU	500 Orang	20.000.000
2	7	4	2.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Taput	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	100 Orang	10.000.000	DAU	100 Orang	20.000.000
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		PERSENTASE PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN	46,28%	60.000.000		50,16%	65.000.000

2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	15 Perusahaan	40.000.000		15 Perusahaan	45.000.000
2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Taput	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	15 Perusahaan	40.000.000	DAU	15 Perusahaan	45.000.000
2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah Jumlah Tenaga Kerja Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja	3 Perkara 3600 Orang	20.000.000		3 Perkara 3600 Orang	20.000.000
2	7	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Taput	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	3 Perkara	10.000.000	DAU	3 Perkara	10.000.000
2	7	5	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Taput	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3600 Orang	10.000.000	DAU	3600 Orang	10.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023 serta memperhatikan prioritas skala pembangunan dalam pemenuhan pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi *Covid-19*.

5.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Kerja tahun 2023 dengan penuh tanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya serta menjaga konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
2. Komitmen tersebut selanjutnya diharapkan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang akan ditandatangani baik di tingkat Eselon II, Eselon III, Jabatan Fungsional, dan Staf.
3. Akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2023 untuk mendukung efektivitas pelaksanaannya.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkan Rencana Kerja tahun 2023, selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

TARUTUNG, 22 DESEMBER 2022

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**

